



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.124, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Republik Indonesia-
Republik Belarus. Pembebasan Visa. Paspor
Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Minsk, Belarus, pada tanggal 15 September 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Official/Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Official/Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 15 September 2011 di Minsk, Belarus, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS
TENTANG
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
ATAU PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Berhasrat untuk mempromosikan perkembangan lebih jauh dari hubungan bilateral dan kerja sama yang baik di antara kedua negara,

Menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi perjalanan warga negara dari kedua negara yang memegang paspor diplomatik atau dinas,

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Belarus untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk (tidak dapat diperpanjang).
2. Warga Negara Belarus, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk (tidak dapat diperpanjang).

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

PASAL 3
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Warga negara salah satu Pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan persyaratan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini, berhak memasuki, menetap, transit, dan meninggalkan wilayah Pihak lainnya melalui pos lintas perbatasan yang terbuka bagi lalu lintas internasional, dengan syarat bahwa yang bersangkutan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pihak tersebut sehubungan dengan prosedur kedatangan, perjalanan, menetap, dan keluarnya warga negara asing.

PASAL 4
HAK PIHAK BERWENANG

1. Pihak yang berwenang dari masing-masing Pihak berhak menolak kedatangan atau mengakhiri izin tinggal siapapun yang memperoleh fasilitas pembebasan visa berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak.
2. Warga negara masing-masing Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku, wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di negara Pihak lainnya selama berada di dalam wilayah Negara Pihak tersebut.
3. Para Pihak wajib saling memberikan pemberitahuan secara tertulis melalui saluran diplomatik sehubungan dengan adanya perubahan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di negaranya mengenai kedatangan, transit, menetap, dan keluarnya warga negara asing dari wilayahnya.

PASAL 5
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah negara Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya (anggota keluarga merujuk kepada suami/istri, anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun, belum menikah dan tidak

bekerja, serta orang tua yang ditanggung) disyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sah dari misi diplomatik atau konsuler Pihak lainnya sebelum masuk ke wilayah Pihak lainnya.

PASAL 6 PENUNDAAN

1. Masing-masing Pihak dapat menunda sementara Persetujuan ini secara keseluruhan atau sebagian, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban masyarakat atau kesehatan umum.
2. Berlakunya maupun berakhirnya aturan sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal ini harus diberitahukan dalam jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam kepada Pihak lainnya terlebih dahulu melalui saluran diplomatik.

PASAL 7 CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para Pihak wajib saling melakukan pertukaran, melalui saluran diplomatik, contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang digunakan oleh masing-masing Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, sekaligus memberikan informasi sehubungan dengan prosedur pemakaian paspor dimaksud.
2. Dalam hal diterbitkannya paspor diplomatik dan paspor dinas yang baru atau dilakukannya perubahan atas paspor-paspor dimaksud, maka masing-masing Pihak wajib memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, secara tertulis melalui saluran diplomatik, sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penerbitan resmi.
3. Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak hilang atau rusak di wilayah negara Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang di negara penerima melalui misi diplomatik atau kantor konsuler negaranya. Misi diplomatik atau kantor konsuler dimaksud wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya bagi warga negara tersebut.

PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

PASAL 9 PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, jika diperlukan, berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis. Perubahan atau revisi dimaksud mulai berlaku berdasarkan ketentuan pada ayat 1 Pasal 10 dari Persetujuan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

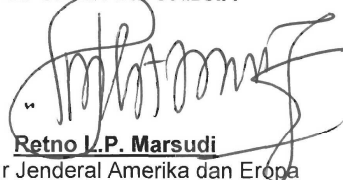
PASAL 10 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir secara tertulis dari Para Pihak melalui saluran diplomatik yang menegaskan bahwa seluruh persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya.
3. Persetujuan ini akan tetap berlaku kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan kuasa yang diberikan, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Minsk pada tanggal 15 September tahun 2011, dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, seluruh naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



Retno L.P. Marsudi
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK BELARUS**



Sergei Aleinik
Deputi Menteri Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Индонезия
и Правительством Республики Беларусь
об отмене виз для владельцев
дипломатических и служебных паспортов

Правительство Республики Индонезия и Правительство Республики Беларусь, далее именуемые Сторонами,

руководствуясь желанием способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений и сотрудничеству между двумя странами,

выражая готовность облегчить взаимные поездки граждан, владеющих дипломатическими и служебными паспортами, на территории государств Сторон,

в соответствии с национальным законодательством своих стран, договорились о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1
ОТМЕНА ВИЗ

1. Граждане Республики Индонезия – владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, транзита или пребывания на территории Республики Беларусь в течение периода, не превышающего 30 (тридцати) дней с даты въезда (не может быть продлен).

2. Граждане Республики Беларусь – владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, транзита или пребывания на территории Республики Индонезия в течение периода, не превышающего 30 (тридцати) дней с даты въезда (не может быть продлен).

СТАТЬЯ 2 СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТА

Срок действия дипломатического и служебного паспорта граждан государств Сторон должен быть не менее 6 (шести) месяцев со дня въезда на территорию государства другой Стороны.

СТАТЬЯ 3 УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА

Граждане государства одной Стороны, которые освобождены от необходимости получения визы в соответствии с положениями статьи 1 настоящего Соглашения, могут въезжать, пребывать, следовать транзитом и покидать территорию государства другой Стороны через любые пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, соблюдая при этом законы и правила государства принимающей Стороны, регулирующие порядок въезда, пребывания и выезда иностранных граждан.

СТАТЬЯ 4

ПРАВА КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ

1. Компетентные органы государства каждой Стороны сохраняют право отказать во въезде или ограничить срок пребывания лицам, освобожденным от необходимости получения визы на основании положений настоящего Соглашения, в соответствии с национальным законодательством государств Сторон.

2. Граждане государства одной Стороны, имеющие дипломатические и служебные паспорта, должны соблюдать законы и правила принимающего государства во время их пребывания на территории государства другой Стороны.

3. Стороны будут письменно информировать друг друга по дипломатическим каналам о любых изменениях в законах и правилах своих государств, регулирующих порядок въезда, пребывания, следования транзитом и выезда иностранных граждан.

СТАТЬЯ 5

ВИЗЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Граждане государства каждой Стороны – владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов, назначенные на должности в дипломатические представительства или консульские учреждения, расположенные на территории государства другой Стороны, включая членов их семей (супруг/супруга, не состоящие в браке неработающие дети в возрасте до 25 лет, находящиеся у них на иждивении родители), должны получить соответствующую безвизную

визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой Стороны до въезда.

СТАТЬЯ 6 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1. Применение настоящего Соглашения может быть полностью или частично приостановлено любой из Сторон в целях обеспечения национальной безопасности, общественного порядка или здоровья населения.

2. О введении либо об отмене мер, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, другая Сторона должна быть заблаговременно уведомлена по дипломатическим каналам не менее чем за 72 (семьдесят два) часа.

СТАТЬЯ 7 ОБРАЗЦЫ И ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ И ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Стороны в течение 30 (тридцати) дней после подписания настоящего Соглашения обмениваются по дипломатическим каналам образцами действующих дипломатических и служебных паспортов, а также информацией о процедуре их использования.

2. В случае введения новых дипломатических и служебных паспортов, а также изменения существующих Стороны будут информировать друг друга письменно по дипломатическим каналам об этих изменениях не позднее чем за 30 (тридцать) дней до их введения.

3. В случае утраты, хищения или повреждения дипломатического или служебного паспорта гражданина государства одной Стороны на

территории государства другой Стороны он должен незамедлительно проинформировать об этом компетентные органы принимающего государства через дипломатическое представительство или консульское учреждение государства своей гражданской принадлежности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает вышеуказанному лицу соответствующий документ для возвращения на территорию своего государства.

СТАТЬЯ 8 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Любые разночтения или споры, возникающие при применении положений настоящего Соглашения, будут разрешаться в дружественной манере посредством консультаций или переговоров между Сторонами.

СТАТЬЯ 9 ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

В случае необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному письменному согласию Сторон. Такие изменения и дополнения вступают в силу в порядке, предусмотренном в пункте 1 Статьи 10 настоящего Соглашения, и составляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения.

СТАТЬЯ 10
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 (тридцать) дней со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

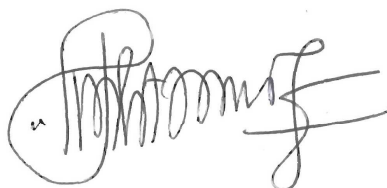
2. Настоящее Соглашение действует в течение 5 (пяти) лет и продлевается на последующие пятилетние периоды.

3. Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет прекращено по желанию одной из Сторон путем направления другой Стороне письменного уведомления по дипломатическим каналам не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты прекращения.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным образом на то уполномоченными, подписали настоящее Соглашение.

Совершено в городе Минске 15 сентября 2011 года в двух экземплярах, каждый на индонезийском, русском и английском языках, причем все тексты являются аутентичными. В случае расхождения в толковании преимущество имеет текст на английском языке.

За Правительство
Республики Индонезия



За Правительство
Республики Беларусь





REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to promote further development of friendly bilateral relations and cooperation between the two countries,

Expressing their readiness to facilitate mutual travels of nationals of the two countries holding diplomatic, official/service passports,

Pursuant to the laws and regulations of the respective countries,

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
VISA EXEMPTION**

1. Indonesian nationals, who are the holders of valid diplomatic or service passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit or stay in the territory of the Republic of Belarus for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry (may not be extended).
2. Belarusian nationals, who are the holders of valid diplomatic or official passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit or stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry (may not be extended).

**ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORTS VALIDITY**

The duration of diplomatic or official/service passport validity of nationals of the state of either Party shall be at least 6 (six) months on the day of entry into the territory of the state of the other Party.

**ARTICLE 3
ENTRY AND EXIT CONDITIONS**

Nationals of the state of one Party entitled to visa exemption under the provision of Article 1 of this Agreement may enter, stay, transit through and leave the territory of the state of the other Party at any border crossing points open for international traffic, provided that they respect the laws and regulations of the state of the respective Party, governing the procedures of entry, travel, stay and exit of foreigners.

**ARTICLE 4
RIGHTS OF AUTHORITIES**

1. The competent authorities of the state of the Parties shall reserve the rights to refuse the entry or terminate the stay of any person entitled to visa exemption under this Agreement according to the national legislation of the states of the Parties.
2. Nationals of the state of one Party holding valid diplomatic or official/service passport shall respect laws and regulations of the host state through the duration of their stay in the territory of the state of the other Party.
3. The Parties shall inform each other in written through diplomatic channels regarding any changes in their national laws and regulations governing the entry, transit, stay and exit of foreigners.

**ARTICLE 5
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSION**

Nationals of the state of either Party who are the holders of valid diplomatic or official/service passports and assigned as member of diplomatic mission or consular office in the territory of the state of the other Party, including their family members (the term family members refer to husband/wife, unmarried children under the age of 25 (twenty five) years and unemployed and their dependent parents), shall be required to obtain

appropriate entry visa from the diplomatic mission or consular office of the state of the other Party prior to the entry.

ARTICLE 6 SUSPENSION

1. The application of this Agreement may be provisionally suspended in whole or in part by either Party for the reasons of national security, public order or public health.
2. The introduction, as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly informed through diplomatic channels to the other Party within no less than 72 (seventy two) hours in advance.

ARTICLE 7 SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

1. The Parties shall exchange through diplomatic channels within 30 (thirty) days after signing of this Agreement the specimens of their valid diplomatic and official/service passports, as well as the information on the procedure or their use.
2. In case of introduction of new diplomatic or official/service passports as well as modifications of existing ones, the Parties shall inform each other, in written through diplomatic channels, about any changes not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.
3. In case of nationals of the state of one Party lose or damage their diplomatic or official/service passports in the territory of the state of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving state through diplomatic mission or consular office of the state of their nationality. The diplomatic mission or consular office concerned shall issue to the aforementioned persons in conformity with the legislation of their state a document for returning to the state of his/her nationality.

ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any differences or disputes arising out of the implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.

**ARTICLE 9
AMENDMENT**

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual written consent of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force according to the provision of paragraph 1 of Article 10 of this Agreement, and form an integral part of this Agreement.

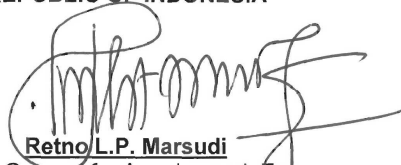
**ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other through diplomatic channels that all requirements for entry into force of this Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for period of 5 (five) years and shall be renewed consecutively for further periods of 5 (five) years.
3. This Agreement shall remain in force, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the other Party through diplomatic channels 30 (thirty) days prior to expected termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized, have signed this Agreement.

Done in Minsk on this 15th day of September in the year of 2011, in two originals, each in the Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**



Retno L.P. Marsudi
Director General for America and Europe

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF BELARUS**



Sergei Aleinik
Deputy Minister of Foreign Affairs



**МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**СВЕДЧЫЦЬ, ШТО ПРЭЗІДЭНТ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
УПАЎНАВАЖЫЎ**

АЛЕЙНІКА СЯРГЕЯ ФЁДАРАВІЧА,

**НАМЕСНІКА МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ,**

НА ПРАВЯДЗЕННЕ ПЕРАГАВОРАЎ ПА ПРАЕКТУ ПАГАДНЕННЯ
ПАМІЖ УРАДАМ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ І УРАДАМ РЭСПУБЛІКІ
ІНДАНЭЗІЯ АБ АДМЕНЕ ВІЗ ДЛЯ ЎЛАДАЛЬНІКАЎ
ДЫПЛАМАТЫЧНЫХ І СЛУЖБОВЫХ ПАШПАРТОЎ І ПАДПІСАННЕ
ДАДЗЕНАГА ПАГАДНЕННЯ.

г. Мінск
14 верасня 2011 года

Міністр
Замежных спраў
Рэспублікі Беларусь

За Начальніка
Галоўнага Дагаворна-Прававога
Упраўлення

